

## Anggota Dewan Kab. Cirebon Temukan Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran

**CIREBON (IM)**-Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menemukan penerima bansos tidak tepat sasaran. Jumlahnya relatif banyak mencapai 400 ribuan. "Hasil verifikasi faktual Dinsos, ada 400 ribuan jumlah penerima bansos tidak tepat sasaran," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan usai menggelar rapat kerja bersama Disdukcapil, Dinsos, dan BNI, Senin (7/11).

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon memperanyakan, problem penerima bansos tidak tepat sasaran itu kenapa masih terus terjadi. Padahal, hal itu menjadi persoalan klasik yang terus menerus terjadi selama ini. Namun, verifikasi yang terus dilakukan tidak membuahkan hasil.

Aan menyebutkan berdasarkan data 2020 lalu, sebanyak 1,6 juta warga Kabupaten Cirebon masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun, pada 2022 ini jumlah penerima bansos itu berkurang. Jumlahnya menjadi 1,2 juta jiwa yang terdapat masuk dalam DTKS. "Dari total itu, sebanyak 232.943 KK sebagai penerima BPNT. Dan 93.659 sebagai penerima bantuan PKH," jelasnya.

Aan menjelaskan, yang jadi persoalan di lapangan banyak orang mampu malah menerima bantuan. Yang tidak mampu, malah tercoret. Ketika ditanya bisa terjadi, ternyata persoalannya karena banyak orang meninggal tidak dilaporkan.

Selain itu, ada juga yang datang atau pindah tempat tinggal tidak tercatat. Pihaknya meminta ke Disdukcapil Kabupaten Cirebon untuk bisa

diverval kembali. Politisi PDIP itu mengingatkan Puskesmas, agar pada saat melakukan verifikasi bisa berlaku independen.

"Jangan mau mendapat tekanan dari pihak luar. Sehingga hasil verifikasi objektif. Kalau layak menerima, ya tulis layak. Kalau tidak layak menerima, ya tulis tidak layak menerima," pintanya.

Aan menilai, pihak BNI yang dihadirkan, karena mereka bertanggungjawab menuntaskan persoalan mesin eDC. Pasalnya banyak terjadi mesin eDC yang dipinjamkan ke tempat lain.

Pihaknya juga meminta pembenahan e-waroeng. Karena dari 232.943 KPM, harusnya ada 1.000 an mesin eDC yang disiapkan. Ternyata hanya ada 543 e-waroeng yang memiliki mesin eDC. Artinya, masih kurang banyak. Harusnya maksimal e-waroeng itu melayani 250 KPM saja.

"Tapi di lapangan masih banyak e-waroeng yang melayani 500 bahkan 900 KPM," terang Aan.

Aan menambahkan, Komisi IV pun meminta pihak BNI untuk menuntaskan persoalan mesin eDC ini. BNI menyanggupi, hanya saja tidak bisa serentak. Mereka akan menyelesaikan perlahan-lahan. Masalahnya, e-waroeng sampai saat ini masih berlaku. Meskipun pola pendistribusian bantuan sudah melibatkan PT Pos. Ternyata ada perubahan mekanisme penyaluran. Sistemnya bergantian.

"3 bulan di e-waroeng, 3 bulan lewat pos. Bulan depan tahun ini, lewat pos. Nanti Januari tahun depan e-waroeng lagi. Nanti kita undang PT POS-nya," tukas Aan. ● **pra**

## Perempuan Penggali Pasir Teras Tertimbun Longsor di Cijeruk Bogor

**BOGOR (IM)**- Seorang perempuan berinisial MA (55), meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Peristiwa nahas itu terjadi saat korban menggali pasir di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Minggu (6/11).

Kapolsek Cijeruk, Kompol Sumijo mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 11.30 WIB. Saat itu, korban sedang mencari pasir di bawah tebing tanah.

Korban sedang mencari pasir bersama suami di lokasi yang dulunya bekas galian. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, dia mencari pasir secara manual, menggunakan cangkul, pengki gitu," kata Sumijo, Senin (7/11).

Saat kejadian, hanya terdapat korban bersama suaminya di lokasi. Posisi korban berada tepat di bawah tebing tanah sedang merapihkan hasil galian. Sementara suaminya berjarak sekitar 15 meter dari korban.

"Suaminya sedang mengayak pasir. Mereka kan di pinggir tebing yang tiba-tiba longsor menimpa korban. Ketinggian

tebingan sekitar 3 meter," kata dia.

Sang suami sempat berusaha menyelamatkan korban. Namun, tumbunan tanah yang terlalu tinggi, dia kemudian mencari pertolongan dari warga sekitar hingga MA berhasil ditemukan, namun kondisinya sudah meninggal dunia. "Bukan bencana karena curah hujan tinggi, tapi karena digali sama mereka. Kalau lokasi galian tuh galian lahan di tebing-tebing, tanah garapan," ungkapnya.

Jenazah MA langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Pihak keluarga telah menerima ikhlas kejadian yang dialami korban sebagai musibah.

Terpisah, Camat Cijeruk, Bangun Septa juga membenarkan adanya peristiwa yang dialami oleh MA. Lokasi tersebut memang lahan bekas galian yang sudah sempat dilakukan pengecekan. "Lokasi merupakan bekas galian yang sudah dilakukan pengecekan oleh pementah daerah," jelas Bangun. ● **pra**

IDN/ANTARA



TARGET UJI COBA JALAN TOL CISUMDAWU

Pekerja menyelesaikan perbaikan badan Jalan Tol Cisumdawu di Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (7/11). Ditjen Bina Marga bersama BPJT, Korlantas Polri dan Ditjen Perhubungan Darat telah melaksanakan uji laik fungsi Jalan Tol Cisumdawu seksi 2 dan 3 yang ditargetkan akan segera dibuka guna mendukung jalur libur Natal dan Tahun Baru.

## Lahan Pertanian dan Perikanan Warga di Gununghalu Diterjang Longsor Tebing

**NGAMPRAH (IM)**- Lahan pertanian dan perikanan milik warga di Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat diterjang longsor tebing setinggi 40 meter. Akibatnya lahan pertanian dan perikanan milik warga tersebut rata tertutup longsor.

Seperti diketahui, intensitas hujan memicu tebing setinggi 40 meter dengan panjang 30 meter ambrol dan menimbun lahan sawah di Kampung Hegarmanah, RT 02 /RW 27, Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Tak hanya lahan pertanian yang baru saja ditanami padi, bencana longsor tersebut juga ikut menutup kolam ikan milik warga. Akibatnya, puluhan kilogram ikan mati. Salah seorang pemilik sawah yang terkena longsor, Ma'mun Samsudin (62) menyebut, lahan sawah miliknya yang tertimbun longsor luasnya sekitar 200 meter persegi. Sementara, dalam kolam ikan miliknya ada 25 kilogram ikan.

"Ada ikan nila dan mas. Semuanya habis diterjang longsor," katanya, Senin (7/11).

Ia menuturkan, bencana longsor tersebut terjadi usai hujan deras dengan waktu cukup lama, pada beberapa pekan

terakhir. Menurutnya, puncak hujan terjadi pada 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB.

Akibatnya, sambung dia, kondisi tanah di tebing itu menjadi labil dan mudah terbuaya air. "Waktu itu hujan gak berhenti se-harian. Pas saya lihat ke sini sore-sore tanah sudah habis menutup sawah dan kolam," jelasnya.

Ia mengaku, khawatir longsor tersebut bakal menerjang bangunan rumah di lokasi. Sebab, letak tebing longsor berdekatan dengan dua rumah warga. Selain itu, tiap kali hujan turun dirinya kerap was-was lantaran adanya longsor susulan mengingat posisi rumah berada di puncak tebing. "Khawatir juga ada longsor susulan. Jadi kalau hujan selalu waspada liat ke luar ada tanda-tanda retakan atau tidak," ucapnya.

Sebelumnya, Pemda KBB siap menaikkan status siaga darurat bencana menghadapi musim penghujan. Menyikapi hal itu, Pemda KBB menyiapkan dana sebesar Rp15 miliar dari pos belanja tak terduga (BTT) telah disiapkan untuk mendukung status siaga darurat bencana.

Rencananya, status siaga darurat bencana akibat cuaca ekstrem atau hidrometeorologi akan diterapkan mulai Oktober 2022 hingga April 2023. ● **pra**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## KEBAKARAN KANTOR PEMKOT BANDUNG

Seorang aparat sipil negara menyelamatkan barang-barang dari lokasi kebakaran gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (7/11). Kebakaran tersebut diduga diakibatkan oleh percikan api saat perbaikan bangunan sehingga menghanguskan gedung Bappelitbang di area perkantoran Pemkot Bandung.

# Pemkab Bogor akan Cari Lahan Baru bagi PKL di Stadion Pakansari

PKL merupakan pelaku ekonomi. Jadi mereka harus ditempatkan di tempat yang layak. Jangan sampai PKL yang ditertibkan malah kembali lagi ke kawasan yang sudah bersih, sehingga mengganggu kawasan yang tidak semestinya digunakan untuk berjualan, kata KadiskopUKM Kabupaten Bogor, Asep Mulyana.

**CIBINONG (IM)**- Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah ditertibkan pada akhir pekan lalu. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (DiskopUKM) Kabupaten Bogor memper-timbangkan untuk mencari lahan baru bagi para PKL yang telah ditertibkan.

KadiskopUKM Kabupaten Bogor, Asep Mulyana, mengatakan jangan sampai PKL yang ditertibkan malah kembali lagi ke kawasan yang

sudah bersih. Bahkan malah kedatangan PKL yang baru. Oleh karenanya, Asep meng-gaku setuju jika para PKL tersebut ditempatkan di tempat yang layak. Sehingga, tidak mengganggu kawasan di tempat yang tidak semestinya digunakan untuk berjualan.

"Iya, kalau saya ada tempat yang membuat para pedagang bisa beraktivitas dengan baik dan tidak membuat suasana jadi kumuh, kita mah setuju dan ingin," kata Asep dikonfirmasi, Senin (7/11).

Menanggapi para PKL

yang meminta tempat baru untuk berdagang, Asep mengatakan, PKL juga merupakan pelaku ekonomi. Namun, belum memiliki tempat dan legalitas. "Untuk itu saya dari Dinas Koperasi & UKM ingin mereka dilakukan penataan. Itu juga kalau lokasi untuk penataannya ada," tuturnya.

Sebab, kata dia, para pedagang wajib memiliki tempat usaha yang sesuai agar tidak mengganggu kegiatan lain. Ia pun ingin segera mendapatkan lahan untuk menata para PKL tersebut agar bisa kembali berjualan.

"Tapi ya harus konsekuen. Walaupun berjualan, nanti tahu-tahu ditertibkan datang lagi PKL lain yang masuk. Itu yang khawatir harus dilakukan Pemerintah Daerah melalui Satpol PP. Jangan sampai ditata, ditertibkan, tahu-tahu muncul lagi yang baru. Nah itu tuh yang bikin suasana penataan enggak akan berhasil," ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan Satpol PP Kabupaten Bogor

membongkar dan menertibkan ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penertiban tersebut dilakukan lantaran PKL yang ada dinilai membuat kawasan sekitar Stadion Pakansari tampak kumuh.

Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Iman Nagarasid, mengatakan penertiban tersebut dilakukan pada Sabtu (5/11) dan Ahad (6/11). Penertiban ini merupakan penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertibam umum. "Sudah dilakukan penertiban semenjak hari Sabtu (5/11). Ada kurang lebih 300 PKL dilakukan penertiban," kata Cecep.

Cecep menjelaskan, PKL yang disasar petugas untuk ditertibkan yakni PKL yang berjualan di bahu jalan dan trotoar. Agar tidak kembali berjualan di kawasan tersebut, ia mengerahkan personel untuk melakukan pengawasan.

"Pengawasan pasca penertiban dilakukan bisa dua hingga

tiga shift," ujarnya.

Lebih lanjut, Iman mengatakan, penertiban diawali dengan penyesiran PKL mulai dari Jaln Eddy Yoso Martadipura, lingkaran Stadion Pakansari. Selain itu, petugas juga melakukan teguran kepada PKL serta pemutusan kabel listrik milik PKL di area tersebut.

Menurutnya, selama kegiatan penertiban berjalan lancar, aman dan kondusif. Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Di mana, kata dia, sebelumnya pada rapat koordinasi, Satpol PP Kabupaten Bogor juga mengundang RT/RW, tokoh masyarakat, termasuk perwakilan para pedagang setempat.

"Sosialisasi kemarin itu sudah cukup menurut saya, karena semua unsur yang terlibat kita undang semua. Kemarin saya tegas bicara, kami akan melakukan langkah penertiban terhadap para PKL yang ada di lingkungan Pakansari," ujar Cecep.

● **gio**

## SEORANG TUKANG LAS DIAMANKAN

# Gedung Bappelitbang Bandung Terbakar, Dokumen Berhasil Diamankan

**BANDUNG (IM)**- Petugas pemadam kebakaran (damkar) berhasil mengamankan sejumlah dokumen dari kebakaran yang terjadi di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, yang berada di kompleks Balai Kota Bandung, Jalan Aceh Nomor 36, Senin (7/11).

Meski beberapa dokumen fisik terbakar, namun komputer dan laptop yang digunakan sebagai backup data-data dokumen tersebut berhasil diamankan. "Petugas langsung mengamankan komputer dan laptop yang digunakan untuk mem-backup dokumen-dokumen fisik yang ada di dalam gedung."

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung dibantu dari Kabupaten Bandung Barat dikerahkan nuntuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan selama dua jam dan pada pukul 12.30 WIB dilakukan proses pendinginan.

Sebanyak 20 unit mobil damkar bersama 50 personel dikerahkan untuk memadamkan api di gedung dua lantai tersebut. Api bisa cepat dipadamkan karena

di lokasi kejadian juga sedang turun hujan.

"Proses pemadaman lebih cepat karena di lokasi turun hujan. Dalam dua jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada kesulitan yang signifikan karena ada beberapa sumber air yang bisa digunakan."

Sejauh ini tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam insiden tersebut. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Iwan Rusmawan, mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memadamkan api.

"Kita ada bantuan juga dari Damkar Kabupaten Bandung Barat yang membantu pemadaman," kata Iwan Rusmawan. Hingga kini, kata Iwan, pihaknya belum bisa menyebutkan penyebab pasti kebakaran yang melanda Gedung Bappelitbang Kota Bandung tersebut.

Lokasi gedung Bappelitbang dua lantai yang terbakar tersebut berada dalam Komplek Balai Kota Bandung, yakni kantor untuk Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

"Belum, kita belum bisa menentukan faktor penyebab kebakaran dari apanya, kantanya ada dari AC, dan ada informasi lagi sedang ada yang memperbaiki atap atau apa. Tetapi, kami belum bisa menentukan, baru sekadar dugaan saja, yang pasti sekarang minta fokus ke pemadaman agar tidak merembet ke dalam lagi," kata dia.

## Tukang Las Diamankan

Sementara itu, seorang tukang las bersama barang bukti diamankan polisi di sela-sela kebakaran yang memperbaiki atap atau apa. Tetapi, kami belum bisa menentukan, baru sekadar dugaan saja, yang pasti sekarang minta fokus ke pemadaman agar tidak merembet ke dalam lagi," kata dia.

Laki-laki bersama jaket itu diamankan dengan selang las dan sebuah tabung gas melon 3 kg. Informasi sementara bahwa saat sebelum terjadi kebakaran ada orang yang tengah membentulkan atap gedung menggunakan peralatan las listrik Senin (7/11). Diduga percikan api tersebut yang membakar atap gedung. ● **pra**



IDN/ANTARA

## UNJUK RASA KEPALA SEKOLAH SMK SWASTA DI JAWA BARAT

Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/11). Mereka menuntut kepada Pemerintah Jawa Barat agar Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk para siswa tidak mengalami penurunan anggaran sekaligus meminta tidak adanya diskriminasi pendidikan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri.

## Kota Bogor Segera Miliki Sekolah Satu Atap

**BOGOR (IM)**- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor memastikan pembangunan Sekolah Satu Atap selesai tepat waktu sehingga dapat beroperasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024.

Ketua Komisi VI DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan, proyek pembangunan Sekolah Satu Atap di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal yang telah biaya mencapai lebih kurang Rp25 miliar, menurut pemerintah setempat masih memerlukan anggaran Rp7,7 miliar untuk pembangunan fisik pada tahun 2023.

Pengajuan anggaran Rp7,7 miliar itu masuk ke dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.

Sementara untuk mengejar operasional sekolah pada 2024 diburuhkan mebel, sehingga pengerjaan proyek pembangunan fisik harus dikerjakan awal tahun dan pada perubahan APBD 2023 anggaran mebel bisa digelontorkan.

Pemantapan kinerja pembangunan ini akan dilakukan melalui diskusi DPRD dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor. "Kami agak khawatir pada saat tahun 2024, masuk dalam tahun ajaran baru di sekolah SD dan SMP Satu Atap ini belum bisa mengikuti proses

PPBD sehingga nanti akan kosong satu angkatan atau satu tahun," katanya, beberapa waktu lalu.

Karnain pun menyampaikan salah satu langkah yang telah dilakukan DPRD ialah menunjuk lokasi pembangunan Sekolah Satu Atap tersebut pada Senin (31/10) lalu dipimpin oleh Karnain Asyhar dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV Said Muhamad Mohan serta anggota Komisi IV yang terdiri dari Jatin, Eny Indan, Siti Maesroh, Rifki Alaydrus, Murtdallo dan Dody Hikmawan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan segera menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik), agar proses pengadaan mebel, perizinan hingga tenaga pengajar dan pendukung bisa segera disiapkan.

Menurut Mohan, penyelesaian Sekolah Satu Atap perlu dirampungkan dengan waktu yang tepat, sebab target pembangunan unit sekolah baru di Kota Bogor masih harus dikejar, sesuai dengan hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Bappeda.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, minimal harus ada 30 unit SMP Negeri di Kota Bogor, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. ● **pur**

## Empat Bangunan Liar di Puncak akan Dibongkar, Salah satunya Hotel

**PUNCAK (IM)**- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Bogor akan segera menertibkan empat bangunan liar di wilayah Puncak itu berasal dari Pemkab Bogor, Kementerian ATR/BPN, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wawan Darmawan menuturkan bahwa jumlah dan letak bangunan liar yang melanggar aturan GSS merupakan hasil kajian Kementerian ATR/BPN, BBWSCC, dan Kementerian PUPR. "Penentuan pelanggaran aturan GSS itu wewenang BBWSCC Kementerian PUPR yang didukung data Kementerian ATR/BPN," tutur Wawan Darmawan.

Keempatnya merupakan bagian dari delapan bangunan yang dinilai liar dan sebelumnya sudah dinyatakan melanggar GSS. ● **gio**